



## Membangun Sistem Pengendalian Internal untuk Menanggulangi Resiko Fraud di Perusahaan

Jennie Aurellia Zaneta

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: [Jennieaurellia@icloud.com](mailto:Jennieaurellia@icloud.com)

**Abstract.** *This article discusses the development of an internal control system as an effort to overcome the risk of fraud in the company. Through in-depth analysis of existing policies, procedures and practices, this research identifies key elements that can strengthen organizational integrity. Using a case study approach, this article shows how implementing effective controls, employee training, and reporting mechanisms can increase transparency and accountability. The results of this research conclude that a comprehensive internal control system not only reduces the risk of corruption, but also encourages an ethical culture in the work environment, thereby supporting the company's sustainability and reputation.*

**Keywords:** *Internal, Company, Work Environment, Integrity.*

**Abstrak.** Artikel ini membahas pengembangan sistem pengendalian internal sebagai upaya untuk menanggulangi risiko fraud di perusahaan. Melalui analisis mendalam terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik yang ada, penelitian ini mengidentifikasi elemen kunci yang dapat memperkuat integritas organisasi. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, artikel ini menunjukkan bagaimana implementasi kontrol yang efektif, pelatihan bagi karyawan, dan mekanisme pelaporan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang komprehensif tidak hanya mengurangi risiko korupsi, tetapi juga mendorong budaya etis di lingkungan kerja, sehingga mendukung keberlanjutan dan reputasi perusahaan.

**Kata Kunci:** Internal, Perusahaan, Lingkungan Kerja, integritas.

### 1. PENDAHULUAN

Di tengah dinamika dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, risiko korupsi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan di seluruh dunia. Korupsi tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik, merusak reputasi, dan berdampak negatif pada iklim investasi. Oleh karena itu, pembangunan sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk menanggulangi risiko korupsi ini. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh perusahaan di seluruh dunia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan perusahaan dari segi finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan integritas suatu organisasi. Dalam konteks ini, membangun sistem pengendalian internal yang efektif menjadi sangat penting sebagai langkah pencegahan terhadap potensi risiko korupsi. Ibu Nurhayani, seorang pegawai swasta, menegaskan bahwa sistem pengendalian internal tidak hanya berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan

wewenang, tetapi juga untuk memastikan transparansi dalam setiap proses bisnis, serta melindungi integritas perusahaan.

Sistem pengendalian internal yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif. Hal ini mencakup penetapan kebijakan dan prosedur yang jelas, serta pelaksanaan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Pengendalian internal juga mencakup penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk memantau dan mengawasi aktivitas bisnis, sehingga potensi penyalahgunaan dapat diminimalisir. Selain itu, keterlibatan semua pihak dalam perusahaan, dari manajemen hingga karyawan, menjadi kunci dalam membangun kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi.

Sebagai contoh, banyak perusahaan yang telah menerapkan kode etik yang jelas dan melakukan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya etika bisnis dan penghindaran praktik korupsi. Implementasi kode etik ini menjadi salah satu langkah proaktif untuk membangun budaya organisasi yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki sistem pengendalian internal yang kuat cenderung memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dan mampu mempertahankan reputasi yang baik di mata stakeholder.

Namun, meskipun pentingnya pengendalian internal diakui, masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan sistem ini secara efektif. Sebagian besar tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kurangnya dukungan dari manajemen puncak, resistensi terhadap perubahan, dan minimnya sumber daya untuk implementasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang komprehensif dalam membangun dan memelihara sistem pengendalian internal, mulai dari evaluasi risiko hingga pengembangan rencana mitigasi yang sesuai.

Dalam konteks ini, wawancara dengan Ibu Nurhayani memberikan wawasan berharga mengenai perlunya membangun sistem pengendalian internal yang robust untuk menanggulangi risiko korupsi di perusahaan. Beliau menggarisbawahi bahwa sistem ini haruslah diintegrasikan ke dalam budaya perusahaan dan dijalankan dengan komitmen penuh dari seluruh lapisan organisasi. Hal ini penting agar pengendalian internal tidak hanya dilihat sebagai kewajiban, tetapi sebagai bagian integral dari cara perusahaan menjalankan bisnisnya.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah konkret dalam membangun sistem pengendalian internal yang efektif

untuk mengatasi risiko korupsi di perusahaan. Kami akan mengeksplorasi berbagai aspek, mulai dari pemetaan risiko, penerapan kebijakan, hingga peran teknologi dalam memperkuat pengendalian internal. Melalui pemahaman yang mendalam dan implementasi yang tepat, diharapkan perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap integritas organisasi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan permasalahan utama yaitu bagaimana peran dan implementasi sistem pengendalian internal dalam menanggulangi risiko fraud di perusahaan?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Narasumber utama penelitian ini adalah Ibu Nurhayani, seorang pegawai swasta yang memiliki pengalaman terkait pengendalian internal di perusahaan tempatnya bekerja. Wawancara ini berfokus pada pandangannya mengenai pentingnya pengendalian internal dalam menanggulangi risiko korupsi, terutama terkait penyalahgunaan wewenang dan transparansi proses bisnis. Selain wawancara, artikel ini juga merujuk pada literatur sekunder untuk mendukung analisis. Literatur yang dipilih meliputi berbagai penelitian mengenai pengendalian internal dan pencegahan korupsi.

## **3. PEMBAHASAN**

Sistem pengendalian internal adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh suatu organisasi untuk memastikan bahwa operasi berjalan secara efisien dan efektif, laporan keuangan akurat, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem ini berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan atau penyelewengan, serta melindungi aset organisasi. Elemen kunci dari sistem ini meliputi:

- 1) Lingkungan pengendalian: Mencakup sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen yang memengaruhi budaya perusahaan.
- 2) Penilaian risiko: Mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan.

- 3) **Aktivitas pengendalian:** Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan.
- 4) **Informasi dan komunikasi:** Proses untuk mengidentifikasi, menangkap, dan mengomunikasikan informasi relevan tepat waktu.
- 5) **Pemantauan:** Mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal secara berkelanjutan. Sistem pengendalian internal mencakup serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk menjaga kekayaan perusahaan, memastikan keakuratan laporan keuangan, serta menghindari kecurangan dan penyalahgunaan wewenang (Ali, 2022). Karena penyalahgunaan kekuasaan merupakan masalah yang serius dan harus segera diatasi.

Sistem pengendalian internal memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mencegah korupsi di perusahaan melalui berbagai mekanisme yang terstruktur. Beberapa mekanisme penting tersebut meliputi deteksi dan pencegahan dini, pembatasan wewenang serta pemisahan tugas, dan komunikasi serta transparansi internal. Mekanisme deteksi dan pencegahan dini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi anomali atau perilaku mencurigakan sebelum berkembang menjadi tindak korupsi. Rahman (2021) menjelaskan bahwa perusahaan yang menerapkan audit internal secara rutin dan menyeluruh memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar atau penyalahgunaan dana. Misalnya, sistem audit ini dapat mendeteksi penyimpangan dalam pengeluaran anggaran atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pemeriksaan silang yang dilakukan melalui sistem audit internal tersebut akan membantu perusahaan memastikan bahwa tidak ada celah bagi karyawan untuk melakukan tindak kecurangan atau korupsi. Selain itu, Rahman menekankan bahwa pengawasan berlapis, seperti melibatkan auditor eksternal dalam beberapa kasus, akan meningkatkan efektivitas pengawasan perusahaan. Dengan adanya pemeriksaan dari pihak eksternal, proses audit internal dapat menjadi lebih objektif dan transparan. Pada akhirnya, pengawasan ini berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap aset perusahaan dan memastikan bahwa seluruh transaksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Susanto (2023) menguraikan bahwa salah satu langkah efektif untuk mencegah korupsi adalah dengan menerapkan pembatasan wewenang dan pemisahan tugas secara ketat. Dalam praktiknya, pembatasan wewenang berarti memberikan batasan yang jelas terhadap setiap posisi dalam perusahaan terkait dengan akses informasi dan otorisasi transaksi. Misalnya, dalam bagian pengadaan, seseorang yang memiliki otorisasi untuk membuat pesanan pembelian tidak boleh

memiliki kewenangan untuk menyetujui atau melakukan pembayaran. Dengan membatasi akses ini, perusahaan dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh individu yang memiliki niat buruk. Pemimpin organisasi juga diharapkan mampu mendesain struktur organisasi yang mendorong adanya saling pengawasan antarbagian. Dengan cara ini, setiap keputusan strategis di perusahaan akan melibatkan beberapa pihak yang memiliki tugas berbeda-beda, sehingga setiap tindakan yang dilakukan akan selalu mendapat pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pemisahan tugas yang baik akan meminimalkan peluang terjadinya tindakan korupsi dan kecurangan karena setiap individu memiliki batasan yang terukur dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Transparansi adalah salah satu elemen penting dalam mencegah korupsi di perusahaan. Wulandari (2023) menekankan bahwa komunikasi yang transparan dan terbuka dalam setiap proses bisnis serta penerapan kode etik perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan risiko kecurangan. Dalam lingkungan kerja yang transparan, setiap karyawan diharapkan untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama, sehingga setiap tindakan yang mencurigakan dapat segera terdeteksi oleh rekan kerja lainnya.

Dengan mengimplementasikan sistem pelaporan yang terbuka, di mana karyawan dapat melaporkan setiap tindakan mencurigakan tanpa takut akan adanya balasan negatif, perusahaan dapat menciptakan suasana kerja yang aman dan terbuka. Sistem pelaporan anonim atau whistleblowing juga dapat diterapkan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal untuk lebih mendorong transparansi di semua level organisasi. Selain itu, kode etik perusahaan yang kuat dan jelas akan membantu memberikan pedoman kepada karyawan mengenai tindakan yang diharapkan dan yang dilarang. Kode etik ini sebaiknya mencakup aturan yang jelas mengenai tindakan korupsi, konsekuensi yang akan dihadapi, dan peran setiap karyawan dalam menjaga integritas perusahaan. Transparansi dan komunikasi terbuka akan menciptakan budaya organisasi yang kondusif untuk mencegah korupsi dan menjaga reputasi perusahaan di mata publik.

Perkembangan teknologi di bidang keuangan dan komunikasi tidak hanya membuka pintu bagi inovasi dan kemudahan, tetapi juga menimbulkan risiko baru terkait keamanan dan integritas transaksi keuangan. Oleh karena itu, implementasi sistem pengendalian internal yang efektif sangat penting dalam menangkal penyalahgunaan wewenang di perusahaan. Sistem ini tidak hanya memberikan aturan yang jelas, tetapi juga menetapkan mekanisme pengawasan yang memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa semua karyawan bertindak sesuai dengan

tanggung jawab dan etika profesional mereka. Ada beberapa komponen penting dalam implementasi sistem pengendalian internal untuk menangkal penyalahgunaan wewenang, antara lain:

### **1) Strategi untuk Mengurangi Penyalahgunaan Wewenang**

Prasetyo (2020) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif mengandung aturan dan regulasi yang tegas serta sanksi yang jelas terhadap pelanggaran, yang secara langsung membatasi kemampuan individu untuk menyalahgunakan wewenang. Dengan memiliki kebijakan yang ketat, seperti pemisahan tugas dan pembatasan akses informasi, perusahaan dapat meminimalkan potensi terjadinya penyalahgunaan. Misalnya, perusahaan dapat memberlakukan sistem di mana setiap keputusan keuangan atau pengeluaran besar harus melalui persetujuan dari lebih dari satu pihak. Selain itu, pembatasan terhadap akses data sensitif juga dapat diberlakukan, sehingga hanya individu tertentu yang memiliki otoritas untuk mengakses informasi tersebut. Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran kebijakan perusahaan akan memberikan efek jera dan mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sistem ini memungkinkan karyawan untuk mengetahui dengan jelas batasan mereka dan konsekuensi dari tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan. Dengan demikian, sistem pengendalian internal berperan sebagai penghalang bagi mereka yang berniat menyalahgunakan posisi atau tanggung jawab yang mereka emban.

### **2) Prinsip Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban**

Menurut Fitriani (2022), audit internal secara reguler menjadi salah satu elemen penting dalam pengendalian internal yang mendorong akuntabilitas setiap karyawan, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang.<sup>8</sup> Proses audit memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai kesesuaian antara praktik aktual dan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap departemen dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan dan tindakan mereka, sehingga integritas dan efisiensi operasional perusahaan dapat terjaga. Audit internal yang rutin juga dapat mendorong perusahaan untuk memperbarui dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perkembangan bisnis dan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam menjaga integritas perusahaan. Implementasi akuntabilitas yang konsisten ini akan

meningkatkan kesadaran karyawan terhadap tanggung jawab mereka, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan.

### **3) Pendapat Ibu Ani tentang Sistem Pengawasan**

Dalam wawancara, Ibu Ani menekankan bahwa sistem pengendalian internal dapat berfungsi sebagai alat pengawasan yang memastikan bahwa semua pihak dalam perusahaan bertanggung jawab atas tindakannya. Menurutnya, dengan penerapan pengawasan yang ketat, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan terbuka, di mana setiap karyawan merasa diawasi dan terdorong untuk bertindak sesuai dengan etika profesional. Ibu Ani juga menyebutkan bahwa adanya sistem ini memaksa karyawan untuk mematuhi prosedur yang ada, sehingga risiko penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Ibu Ani menambahkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal ini tidak hanya sebatas dalam hal pengawasan, tetapi juga mencakup pelatihan dan edukasi mengenai pentingnya etika kerja dan konsekuensi dari penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, karyawan akan lebih memahami dampak dari tindakan mereka terhadap reputasi dan stabilitas perusahaan secara keseluruhan. Fungsi pengawasan ini juga menciptakan budaya kerja yang mendorong kepatuhan dan meminimalkan peluang bagi individu untuk bertindak di luar batas kewenangan mereka.

Pengendalian internal sangat penting untuk menanggulangi risiko korupsi di perusahaan dengan cara meningkatkan transparansi, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menjaga integritas. Perusahaan harus terus mengembangkan dan memperbaiki sistem pengendalian internalnya agar sejalan dengan dinamika bisnis serta terus meningkatkan budaya etika di dalam organisasi. Meminimalkan keterlibatan langsung dengan pihak berwenang adalah salah satu cara teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan sistem peradilan dan mencegah korupsi. Dengan mengotomatiskan proses yang sebelumnya manual, pengadilan elektronik dapat membantu mengurangi korupsi dalam sistem peradilan tradisional.

#### **4. KESIMPULAN**

Sistem pengendalian internal merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang krusial dalam mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan serta melindungi aset perusahaan. Elemen kunci dari sistem ini mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Implementasi yang efektif dari sistem ini membantu dalam mencegah korupsi melalui deteksi dan pencegahan dini, pembatasan wewenang, pemisahan tugas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Audit internal dan eksternal memainkan peran penting dalam memastikan integritas serta menjaga keakuratan laporan keuangan perusahaan. Transparansi, kode etik yang kuat, dan mekanisme pelaporan yang terbuka, seperti whistleblowing, juga turut mendukung upaya pencegahan korupsi. Dalam konteks kemajuan teknologi, perusahaan perlu menyesuaikan sistem pengendalian internal untuk menangkal risiko keamanan dan integritas keuangan.

#### **5. SARAN**

- 1) **Memperkuat Pembatasan Wewenang dan Pemisahan Tugas:** Untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang, dapat diterapkan batasan yang ketat terkait akses informasi dan otorisasi transaksi, serta pemisahan tugas antar bagian. Struktur organisasi yang jelas juga dapat mendorong adanya pengawasan antarbagian yang lebih efektif.
- 2) **Meningkatkan Audit Internal dan Melibatkan Auditor Eksternal:** Melakukan audit internal secara rutin dan menyeluruh dapat membantu mendeteksi anomali dalam transaksi. Pengawasan berlapis dengan melibatkan auditor eksternal dapat meningkatkan objektivitas dan efektivitas pengawasan.
- 3) **Manfaatkan Teknologi untuk Pengendalian Internal:** Seiring perkembangan teknologi, perusahaan perlu memanfaatkan solusi digital untuk meningkatkan keamanan dan meminimalkan keterlibatan langsung dalam proses keuangan. Penggunaan sistem audit otomatis dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko korupsi.
- 4) **Memberikan Pelatihan Etika kepada Karyawan:** Pelatihan dan edukasi mengenai pentingnya etika dan konsekuensi dari penyalahgunaan wewenang harus dilakukan secara rutin untuk membangun budaya organisasi yang berintegritas.
- 5) **Promosikan Transparansi dan Kode Etik yang Kuat:** Transparansi dalam komunikasi dan penerapan kode etik yang jelas akan meminimalkan risiko kecurangan. Sistem pelaporan

anonim atau whistleblowing dapat diterapkan untuk mendorong pelaporan tindakan mencurigakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2022). Penerapan sistem pengendalian internal dalam mencegah korupsi di perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2).
- Fitriani, R. (2022). Peranan audit internal dalam menangkal praktik korupsi di perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Indonesia*, 12(2).
- Gupta, P. (2020). Internal control procedures as a means of combating corporate corruption. *International Journal of Auditing*.
- Hasan, Z. (2023). Rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme dan terjadi ketidakmauan penegak hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 828-831.
- Iqbal, M., Ardie, H. J., & Hasan, Z. (2024). Analisis hukum dalam melacak jejak digital dan memahami tindak pidana pencucian uang dalam era teknologi. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*.
- Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak teknologi terhadap strategi litigasi dan bantuan hukum: Tren dan inovasi di era digital. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 4600-4613.
- Krawiec, K., & Summers, L. (2018). Building effective internal controls for corruption prevention. *Journal of Corporate Compliance*, 17(2).
- Prasetyo, D. (2020). Analisis pengendalian internal untuk mencegah korupsi di sektor publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2).
- Rahman, S. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap peningkatan kinerja perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 7(1).
- Susanto, B. (2023). Strategi mengurangi risiko korupsi melalui penerapan sistem pengendalian internal. *Jurnal Etika Bisnis*, 8(1).
- Wulandari, R. (2023). Pentingnya transparansi dalam sistem pengendalian internal untuk mencegah korupsi. *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 3(1).